Walhi Tolak Rencana DKI Bangun Pengelolaan Sampah di Taman Tebet

JAKARTA (IM) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menolak rencana Pemerintah DKI membangun Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Taman Tebet, Jakarta Selatan.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan proyek ini akan berpotensi menambah tingkat pencemaran udara di area publik, seperti taman.

"Bisa dibayangkan area yang biasa di jadikan area publik seperti rekreasi, berolahraga, dan lain sebagainya akan terpapar dampak buruk insinerator," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8).

Insinerator adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara pembakaran. Menurut Soleh, pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator bertentangan dengan Peraturan Daerah DKI Nomor 04 Tahun 2019.

Rencana pembangunan FPSA di Taman Tebet itu dinilai tidak memperhatikan aspek sosial.

Teknologi termal seperti insinerator, kata Soleh, juga bukan energi baru, melainkan teknologi lama yang sudah banyak ditinggalkan.

"Kami melihat ini adalah cara berpikir pendek Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Perumda Sarana Jaya dalam pengelolaan sampah," ujar dia.

Walhi DKI diundang terlibat dalam konsultasi publik soal rencana pembangunan FPSA di Taman Tebet sebagai tindak lanjut dari permohonan PT Envitek Indonesia Jaya.

Proyek ini diinisiasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Walhi meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membatalkan proyek itu.

Pemerintah daerah seharusnya memperkuat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

Menurut Walhi, revitalisasi Taman Tebet dengan memasuki pengelolaan sampah menggunakan teknologi insinerator ini jauh dari konsep dan komitmen Gubernur untuk menjadikan taman tersebut dengan konsep Eco Garden. ● **yan**

Sudah Tidak Ada Lagi Antrean Jenazah di Krematorium Cilincing

JAKARTA (IM) - Manajemen dan Personalia Krematorium Cilincing, Heru Prayitno mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada antrean jenazah pasien Covid-19 yang dikremasi di tempatnya.

Saat dihubungi Jumat (6/8), Heru menyebutkan, jumlah jenazah yang dikremasi setiap harinya tak lagi menyentuh angka lima. "Sudah tidak ada antrean. Masih ada yang dikremasi, hanya dua sampai empat jenazah per hari," kata Heru.

Adapun krematorium ini mulai menerima pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 pada 19 Juli 2021. Krematorium Cilincing diketahui hanya menerima 11 jenazah pasien Covid-19 setiap harinya. Biasanya, 11 kuota itu selalu penuh setiap harinya. Namun, kata Heru, dalam pekan ini antrean terus berkurang dan hari ini hanya tiga jenazah Covid-19 yang akan dikremasi.

Meski demikian, pihak krematorium sedang mempersiapkan petugas pemulasaraan tambahan guna memaksimalkan kapasitas jenazah yang bisa dikremasi. Krematorium Cilincing juga tetap melayani pemulasaraan jenazah non-Covid-19.

Proses pemulasaraan dibagi menjadi dua sif, yakni pagi hari untuk jenazah non-Covid-19, sedangkan jenazah pasien Covid-19 dikremasi pada sore hari. Dalam proses pemulasaraan pasien Covid-19, semua petugas wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun biaya kremasi untuk jenazah pasien Covid-19 sebesar Rp 7 juta, sedangkan untuk jenazah non-Covid Rp 4 juta-Rp 5 juta. Biaya digratiskan bagi warga tidak mampu. ● **yan**

Pemkab Bekasi Alokasikan *Refocusing* Anggaran Untuk Program BERANI

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Forkopimda dan perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Bupati, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (5/8).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan akan mengalokasikan refocusing anggaran di Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk program BERANI (Bekasi Berantas Pandemi).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama dengan Forkopimda dan Perangkat Daerah terkait di Ruang Rapat Gedung Bupati, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis, (5/8).

Saat diwawancarai, Pj. Bupati Dani meyakini penggunaan refocusing anggaran tersebut akan mampu meningkatkan progam BERANI sehingga dapat mempercepat penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

"Refocusing tersebut akan digunakan untuk program BERANI, Bekasi Berantas Pandemi. Kita akan tingkatkan lagi intensitas 3 kegiatan di dalam program BERANI yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan supaya lebih cepat penangan Covid-19 di Kabupaten Bekasi," ujarnya dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Kamis(5/8) malam.

Lebih lanjut, dirinya memiliki target refocusing anggaran sebesar 218 miliar rupiah yang meskipun saat ini masih belum tercapai. Ia menambahkan akan memperketat anggaran kegiatan hingga mencapai jumlah target tersebut.

"Target dari refocusing yang didapatkan sekitar 218 miliar rupiah, tapi sekarang masih minus. Saya targetkan besok sudah tersisir lagi anggarannya karena saya rasa masih ada anggaran yang bisa diketatkan lagi dan ditunda tahun depan. Jika tidak bisa, berarti beberapa sasaran mungkin akan ditunda atau dikurangi," jelasnya.

Dirinya menambahkan, salah satu manfaat refocusing anggaran yang akan dipergunakan untuk program BERANI adalah pemberian bantuan modal usaha untuk usaha mikro yang terdampak, pemberian bantuan kepada pelaku seni, dan guru ngaji yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Dalam program BERANI, kita juga akan pergunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi. Ada bantuan modal usaha mikro bagi yang terdampak pandemi. Lalu ada pelaku seni yang selama pandemi kegiatan panggungnya berhenti, dan termasuk juga guru-guru ngaji akan kita bantu upayakan untuk diberikan bantuan," paparnya. ● **mdl**

IDN/ANTARA

TENDA DARURAT DI RSUD MATRAMAN

Sejumlah petugas medis menangani pasien di tenda darurat yang dijadikan ruang triase di halaman RSUD Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/8). Menurut pengurus RSUD Tenda triase yang dijadikan ruang perawatan sementara tersebut dapat menampung 9 pasien.

Temuan BPK: Pemprov DKI Masih Bayar Gaji Pegawai yang Meninggal

Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862.783.587.

JAKARTA (IM) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 862.783.587. Hal ini berdasarkan hasil temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

Kelebihan ini terjadi karena Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan pegawai yang seharusnya sudah tidak menerimanya pada tahun anggaran 2020, seperti pegawai yang sudah pensiun hingga yang sudah meninggal dunia.

"Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862.783.587," tulis LHP BPK seperti dikutip, Jumat (6/8).

Dalam LHP BPK tersebut, disebutkan 103 pegawai dari 19 organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi DKI Jakarta yang masih mendapat gaji dan tunjangan. Berikuti ini adalah rinciannya, pertama, satu pegawai yang sudah pensiun per 1 Januari 2020 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetapi masih menerima gaji senilai Rp6,334.300,00.

Kedua, 12 pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS yang masih menerima gaji. Mereka berasal dari enam OPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Total keseluruhan gaji yang mereka terima sebanyak Rp 154.979.500,00.

Ketiga, 57 pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP. Mereka berasal dari 7 OPD, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Parekraf, DPMPTSP, Dinas Gulkarmat, Disnakertrans, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Admnistrasi Jakarta Barat. Total keseluruhan gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut senilai Rp352.919.562,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp17.095.000,00 dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai.

Keempat, 31 pegawai melaksankan tugas belajar namun masih menerima TKD/TPP. Mereka berasal dari 8 OPD, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), Dinas Kesehatan, DPMTPSP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Sekretariat Daerah dan Bappeda. Total keseluruhan TKD/TPP yang diterima kepada pegawai yang melaksankan tugas belajar tersebut senilai Rp344.629.057,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp54.819.889,00 dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai.

Kelima, pegawai terkena hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan dikenai sanksi pemotongan TKD/TPP sebesar 20 persen selama dua bulan. Namun terdapat dua pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD/TPP penuh, pegawai pada Kelurahan Karet Tengsin dan pegawai pada Kelurahan Petamburan. Kelebihan pembayaran TKD/TPP ini totalnya Rp 3.921.168,00.

BPK menegaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut BPK, kelebihan pembayaran tersebut disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, pejabat pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi daftar gaji dan TKD bagi PNS dan calon PNS yang berhak untuk menerima gaji dan dan/atau TKD/TPP pada bulan berjalan.

Kedua, pejabat pengelola kepegawaian pada 19 OPD yang disebutkan tidak segera melaporkan perubahaan data atas pegawai meninggal, pensiun karena mencapai BUP, pensiun atas permintaan sendiri dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Ketiga, petugas pemuktahiran data pada BKD kurang cermat dalam melakukan input perubahan data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG). ● **yan**

Kementerian Perdagangan RI Beri Bantuan Telor kepada Pemkot Bekasi

FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurean, DIPL, Ing (kiri) saat memberkan bantuan 3 ton telur ras kepada warga Kota Bekasi yang terdampak Covid-19 yang diterima Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (kanan) di PCB, Kota Bekasi, Jum'at (6/8).

KOTA BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi menerima bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa 3 ton telur ayam ras. Bantuan yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 itu, diserahkan langsung oleh Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, DIPL, Ing di Stadion Patriot Candrabhaga, Jum'at (6/8).

Wali Kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang telah peduli kepada warga dalam menghadapi masa pandemi ini dan akan segera membagikan bantuan itu kepada warga terdampak Covid-19 atau yang sedang menjalankan isoman.

Wali Kota Bekasi mengatakan, telur yang telah diterima ini akan dibagikan dan didistribusikan kepada warga yang terdampak Covid-19, didata oleh BPBD Kota Bekasi yang sebelumnya juga telah mendistribusikan beras untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, mengungkapkan semoga bantuan itu bermanfaat atas dan sampai langsung kepada para isolasi mandiri yang berada di masing masing wilayah.

"Kepedulian ini semoga bisa meminimalisir warga yang benar benar membutuhkan karena terdampak wabah yang masih menyelimuti dunia," ucapnya dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Jum'at (6/8).

Menurutnya, semua pasti berharap wabah ini segera menghilang karena beberapa masuk laporan di dunia perdagangan sudah merasa sulit menjalaninya terutama untuk para pedagang yang telah terkena masa PPKM.

Hal ini, sambungnya, menjadi harapan bersama bisa kembali normal. Untuk itu, semua elemen baik dari pemerintah maupun warga agar bekerja sama dalam menghadapi pencegahan kasus Covid 19 ini. ● **mdl**

Dijadikan Tempat Prostitusi, Wisma Disegel Satpol PP DKI

JAKARTA (IM) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel penginapan Wisma Shinta di Jalan Pisangan Lama 1 Nomor 2, Pulogadung, Jakarta Timur, karena digunakan sebagai tempat prostitusi.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, mengatakan, penyegelan penginapan tersebut juga untuk menindaklanjuti putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

"Pada tahun 2019 lokasi tersebut kedapatan adanya praktek asusila, prostitusi. Ada beberapa wanita yang diamankan pihak kepolisian kemudian berlanjut pada tahun itu dilakukan pencabutan izin tempat usahanya oleh Dinas PTSP, kemudian juga dilakukan penutupan acara permanen," kata Arifin, Jumat (6/8).

Arifin menambahkan, dalam penyegelan penginapan tersebut juga melibatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pihak Kecamatan Pulogadung serta TNI dan Polri.

Arifin mengatakan, pihak pengelola sebelumnya juga telah melakukan gugatan hingga ke Pengadilan Tinggi (PT). Namun akhirnya perkara tersebut dimenangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Pada putusan Mahkamah Agung Pemprov DKI memenangkan perkara ini dan kita akan melakukan putusan dari kasasi Mahkamah Agung dalam bentuk penutupan karena memang izin usaha sudah dicabut sehingga tempat ini ditutup tidak boleh beroperasi dan berkegiatan," ujar Arifin.

Sementara itu, pengacara dari penginapan Wisma Shinta, Yongki Martinus mengatakan. bahwa kliennya akan bertindak koperatif terkait pelaksanaan penyegelan tersebut.

"Terhadap langkah ini kita menghormati mereka menyegel silakan, kami pun akan melakukan langkah hukum yang menurut kami baik. Ini perkaranya dari tahun 2019, kita pun sudah menyampaikan bahkan yang lebih parah dari kami ada. Kami baru sekali dilakukan sidak," tutur Yongki.

Yongki menambahkan, pengelola penginapan juga telah memberikan imbauan kepada seluruh tamu yang menginap untuk tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan asusila.

"Tadi juga sudah lihat di kamar ini juga sudah ditulis tidak boleh berjudi, asusila. Jadi apa yang diperbuat tamu di dalam kita lepas tanggung jawab. Tapi kami juga sudah jelas tidak mengizinkan," ujar Yongki. ● **yan**

Pemkab Bekasi Optimistis Kurangi Sampah 30 Persen lewat Bank Sampah

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, akan segera membangun bank sampah induk untuk mengurangi sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025. Pembangunan itu sesuat dengan isi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 130/PBLS.04/Perek tentang Gerakan Pilah Sampah dari Sumber yang dikeluarkan tertanggal 21 Juli 2021. Sedangkan Surat Edaran tersebut mengacu pada Perpres Nomor 97 tahun 2017 dan Pergub Jabar Nomor 91 tahun 2018.

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Khaerul Hamid mengatakan pembangunan bank sampah induk sebagai upaya gerakan pemilihan sampah.

Selain itu juga, bank sampah juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sampah rumah tangga yang bernilai ekonomi.

"Kita sudah rencanakan untuk pembangunan bank sampah induk itu di Kabupaten Bekasi, segera kita realisasikan," ujar Hamid, Jumat (6/8).

Hamid berujar, bank sampah induk itu direncanakan dibangun di Pusat Daur Ulang (PDU) Mekarmukti Cikarang Utara yang diperuntukkan menjadi koordinator bagi sekitar 160 unit bank sampah yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Jadi proses pemilihan sampah bernilai ekonomi dari bank sampah unit akan disalurkan dan dikelola untuk dapat diteruskan ke pangsa pasar," jelasnya.

Lanjut dia, pihaknya juga akan mempersiapkan penunjang pasar yang jelas, saat ketika menerima bahan atau barang dari sampah yang bernilai ekonomi sudah memiliki pihak yang akan membelinya. Uni bank sampah bisa mengirimkan bahan-bahannya saja, atau bisa juga langsung mengirimkan olahan sampah yang telah menjadi sebuah kerajinan tangan, pupuk atapun benda lainnya yang bahannya dari sampah ke bank sampah induk. "Maka kita sedang siapkan penunjangan pasar yang jelas diopernya ke mana dia harus punya surat perjanjian kerja (SPK)-nya," ungkapnya. ● **pp**